



IMPLEMENTASI SINERGITAS LEMBAGA PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG BUDAYA SADAR BENCANA DI KOTA BALIKPAPAN

Joshua Banjarnahor*, Hayatul Khairul Rahmat, Sri Kartika Sakti

Program Studi Magister Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan, Indonesia

Abstrak

Untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana diperlukan suatu cara untuk menumbuhkan budaya sadar bencana di masyarakat, khususnya di Kota Balikpapan. Guna menumbuhkan budaya sadar bencana tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai Lembaga pemerintah di Kota Balikpapan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberi gambaran kesadaran masyarakat dalam memahami bencana dan implementasi dari sinergitas lembaga pemerintah dalam rangka menumbuhkan budaya sadar bencana di Kota Balikpapan. Temuan dari penelitian ini adalah terdapat sinergitas Lembaga pemerintah seperti BPBD Kota Balikpapan, Kodam VI/Mulawarman, BMKG Stasiun III Geofisika, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pencarian dan Pertolongan, Pangkalan TNI AL, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, maupun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan dalam menanggulangi kebencanaan yang ada di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Dalam sinergitas tersebut, terjalin komunikasi yang baik dan juga kolaborasi dengan stakeholder lainnya dengan baik dalam pra, saat, dan pascabencana. Lembaga-lembaga tersebut juga mengimplementasikan pembangunan budaya sadar bencana masyarakat Balikpapan dengan cara memfokuskan tindakan pencegahan atau mitigasi bencana dengan saling bekerjasama sesuai bidangnya..

Kata Kunci: Implementasi, Budaya Sadar Bencana, Sinergitas, Lembaga Pemerintah.

*Correspondence Address : joshuabasarnas@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v7i2.2020.448-461

© 2020 UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara besar yang terbagi menjadi 34 provinsi. Salah satu provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan terkena bencana adalah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya kota Balikpapan. Kota Balikpapan merupakan kota terbesar kedua setelah Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi pusat bisnis serta industri yang cukup pesat sehingga menjadikannya sebagai salah satu kota dengan perekonomian terbesar di Kalimantan (Rahmat *et al.*, 2018). Adanya rencana pemerintah dalam pemindahan ibukota negara Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur tepatnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara memberikan potensi peningkatan arus kegiatan masyarakat.

Berdasarkan topografi dan kondisi wilayahnya, Balikpapan memiliki risiko bencana yang terdiri dari banjir, longsor serta kebakaran hutan dan lahan (Ariyati *et al.*, 2018). Pada pantauan inaRISK (2019) kota Balikpapan berpotensi memiliki ancaman bencana banjir, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Selain itu, adanya fakta bahwa terdapat patahan atau sesar Paternoster di wilayah Kalimantan Timur tentu dapat

memberikan risiko terjadinya gempa di wilayah kota Balikpapan (Bachri, 2012).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan Suseno (2017) mengungkapkan kejadian bencana kebakaran, tanah longsor maupun banjir pada tahun 2016 menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Hal ini didasari oleh fakta yang diperoleh dari data kejadian bencana yang terjadi pada rentang Januari-Desember 2016. Data menunjukkan kebakaran hutan dan lahan menempati jumlah kejadian tertinggi yaitu 98 kasus, selanjutnya banjir sebanyak 76 kasus, kebakaran pemukiman 35 kasus dan tanah longsor sebanyak 21 kasus. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang paling disoroti karena intensitas kejadiannya meningkat dua kali lipat bahkan dimulai sejak awal tahun 2019 (Glen, 2019). Baru-baru ini Kota Balikpapan juga mengalami bencana banjir mencapai 1.5 meter akibat hujan selama 5 jam (IDNNewstime, 2020).

Pengalaman membuktikan bahwa bencana alam berimplikasi secara langsung terhadap masyarakat di suatu wilayah. Bukan hanya kerusakan secara fisik, tapi banyak keluarga kehilangan sanak saudara akibat

bencana (Priambodo *et al.*, 2020). Kehilangan orang-orang yang dicintai dan rumah yang sudah lama ditinggali merupakan tekanan psikologis bagi warga yang dapat menyebabkan munculnya *PSTD (Post Traumatic Stress Disorder)* atau stres pascabencana (Jia *et al.*, 2010; Rahmat *et al.*, 2018; Rahmat & Alawiyah, 2020). Oleh karena itu, diperlukan sinergitas yang baik antarlembaga pemerintah dalam penanganan bencana ketika terjadi. Tidak saja hanya berfokus pada kebutuhan logistik dan infrastruktur akibat bencana, tetapi juga terhadap kondisi sosial budaya di masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, bencana sering kali dipahami berdasarkan persepsi manusia atau masyarakat, dan atas apa yang mereka rasakan terkait pengalaman emosional pada kejadian-kejadian yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Bencana merupakan salah satu bagian definisi yang disusun dalam suatu konteks sosial budaya hidup masyarakat yang mengalami bencana (Pramono, 2016).

Berbagai literatur membuktikan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana merupakan pilihan kebijakan yang wajib diadopsi

dan diimplementasikan (Prihatin, 2018; Rahmat *et al.*, 2020). Hal ini untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk mencegah banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan. Salah satu caranya adalah dengan menumbuhkan budaya sadar bencana di masyarakat agar masyarakat dapat secara aktif dan mandiri melakukan upaya penyelamatan ketika bencana berlangsung di Kota Balikpapan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kerawanan cukup tinggi.

Lembaga-lembaga pemerintah sudah sepantasnya juga selalu berupaya untuk turut melindungi keamanan masyarakat dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Lembaga-lembaga pemerintahan yang dimaksud, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kodam, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pencarian dan Pertolongan, Pangkalan TNI AL, Persekutuan Dayat Kalimantan Timur, maupun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata bisa mengimplementasikan sinergitasnya bersama-sama bekerja sama membangun budaya sadar bencana. Ke depannya dapat meningkat lagi, implementasi sinergitas *pentahelix*

antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha, diharapkan akan memberikan kekuatan yang tangguh dalam menerapkan *living in harmony with disaster risks* di Kota Balikpapan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi sinergitas lembaga pemerintah untuk mendukung budaya sadar bencana di Kota Balikpapan. Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran kesadaran masyarakat dalam memahami bencana dan implementasi dari sinergitas lembaga pemerintah dalam rangka menumbuhkan budaya sadar bencana di Kota Balikpapan. Sementara itu, manfaat tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan dan rekomendasi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kota Balikpapan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Menurut Moleong (2005), metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan penelitian ini dipilih karena sesuai dengan tujuan peneliti, di mana penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi orang secara individual maupun kelompok. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu wawancara, pencatatan, dan dokumentasi.

Pada pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Berdasarkan Moleong (2005), triangulasi yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sesuatu yang lain

sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kesadaran Masyarakat Kota Balikpapan dalam Memahami Bencana

Menilik pada kasus bencana yang ada di Balikpapan yang memiliki beragam ancaman bencana, sebenarnya jumlah korban dan kerugian bisa lebih diminimalisir lagi dampaknya. Selama 25 tahun terakhir, lebih dari 20 kebijakan penanggulangan bencana alam sebenarnya telah dibuat pemerintah. Semua kebijakan tersebut memiliki substansi yang sama, yakni berupaya melindungi masyarakat dari dampak bencana. Namun, sejauh ini pemerintah belum terbukti secara nyata mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi bencana (Prihatin, 2018).

Dari hasil wawancara narasumber dan temuan kondisi di lapangan, kurangnya pemahaman karakter jenis bencana, kepedulian terhadap lingkungan, dan fasilitas fisik kebencanaan menjadi faktor-faktor yang

menyebabkan kurangnya sadar bencana. Pemahaman karakter jenis bencana di daerah masing-masing seharusnya lebih ditekankan untuk mengetahui sejauh apa skenario terburuk yang dapat terjadi dan bagaimana mengantisipasinya pada waktu dan kondisi yang rawan terjadi bencana.

Selanjutnya kepedulian terhadap lingkungan untuk menjaga kebersihan, misalnya saja untuk membuang sampah pada tempatnya masih belum membudaya sehingga banyak sampah di sembarang tempat yang bisa mengakibatkan tersumbatnya aliran drainase air dan berakibat banjir. Kurangnya kepedulian di wilayah pesisir yang sering mengalami abrasi karena kurang merawat pohon *mangrove* atau juga bisa dari ketidakpedulian terhadap penggunaan alat-alat yang mudah terbakar sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Dalam hal ketersediaan fasilitas fisik bencana, tidak semua lokasi publik memiliki jalur evakuasi, apalagi yang berada di daerah. Program sosialisasi pemerintah juga ternyata belum cukup optimal karena bahkan ada masyarakat yang sudah memiliki lokasi dan rute evakuasi pun terkadang tidak mengetahui keberadaannya. Apalagi untuk keterlibatan masyarakat dalam

simulasi atau pelatihan-pelatihan yang diadakan lembaga pemerintah.

Hal ini menguatkan bahwa budaya sadar masyarakat Kota Balikpapan masih kurang dan sangat perlu untuk ditingkatkan lagi. Apabila budaya sadar bencana ini meningkat, masyarakat tentu akan lebih nyaman tinggal di wilayah yang memiliki risiko bencana karena telah menyiapkan diri dan bersikap antisipatif terhadap bencana. Bagi masyarakat yang bisa menerapkan kearifan lokal dalam menjalankan *living in harmony with risk* seperti ini, maka bencana bisa dijadikan isu rutinitas yang sudah diprediksi dan direncanakan manajemen bencananya sehingga dapat menjalani kehidupan tanpa merasa terganggu oleh ancaman bencana, khususnya dalam menyongsong ibu kota baru ini.

Implementasi dari Sinergitas Lembaga Pemerintah

Berikut adalah implementasi dari berbagai lembaga pemerintah di Kota Balikpapan guna menumbuhkan budaya sadar bencana:

1) BPBD Kota Balikpapan

Di Kota Balikpapan terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balikpapan yang pendiriannya mengacu kepada amanat yang terdapat pada

Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD Kota Balikpapan mempunyai 310 personil dan enam UPT (Unit Pelaksana Teknis) di setiap wilayah dan dua sektor di Baru Tengah dan Gunung Samarinda. UPT yang ada bertugas membantu melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis dari BPBD Kota Balikpapan. Serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di wilayah-wilayah dan sektor-sektor yang ada.

Pada saat kejadian bencana BPBD Kota Balikpapan telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam penanganan bencana. Tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian telah tersusun dan ditetapkan. Sehingga pada saat terjadi bencana mudah untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait. Sinergitas antar instansi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan baik

karena saling membantu menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan tanpa tumpang tindih.

2) BMKG Stasiun Geofisika Balikpapan

BMKG Stasiun Geofisika Balikpapan didirikan pada tahun 1975 yang berlokasi di Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 354, Kelurahan Sepinggian Raya, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur bersebelahan dengan kantor Administrasi Stasiun Meteorologi Balikpapan. Pada tahun 2008 dibangun Kantor Operasional yang berlokasi di Jl. Prona III RT.017 No.36, Sepinggian Raya, Balikpapan, sehingga Kantor yang lama menjadi Kantor Administrasi (Tata Usaha). Pada saat ini, Stasiun Geofisika Balikpapan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika telah beroperasi sejak tahun 1975 dan merupakan Stasiun Kelas III yang memiliki jam operasional pengamatan, pengolahan dan analisa stasiun 24 jam penuh selama 7 hari. Kegiatan yang dilakukan oleh Stasiun Geofisika Balikpapan antara lain :

a) Observasi, pengolahan, analisa dan pelayanan data geofisika, yaitu gempabumi dan listrik udara (menggunakan pendeteksi petir (*Lightning Detector*)).

- b) Observasi permukaan darat meteorologi yaitu menakar hujan.
- c) Observasi langsung atau visual kejadian-kejadian ekstrem yang berhubungan dengan geofisika.
- d) Melaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan geofisika
- e) Melaksanakan pelayanan data petir.

BMKG Stasiun Geofisika Balikpapan juga melakukan pengamatan gempabumi menggunakan peralatan *Seismograph (off line)* yang terpasang di Stasiun Geofisika Balikpapan dan juga mengamati secara *real time* sinyal seismik melalui Geofon (GFZ). Selain itu, BMKG Stasiun Geofisika Balikpapan juga tetap memonitor peralatan InaTEWS yang dipasang di sebagian Kalimantan meliputi Kalimantan Selatan 2 *site*, Kalimantan Timur 2 *site* dan Kalimantan Utara 1 *site*. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian Gempabumi Lokal yang tidak dapat di rekam oleh *Seismograph* di BMKG Stasiun Geofisika Balikpapan.

Penanggulangan *hoax* yang dilaksanakan BMKG Balikpapan tidak hanya sebatas itu, dalam jangka panjang edaran-edaran yang telah didiseminasikan melalui media digital, informasi-informasi tersebut kembali disajikan dalam bentuk buletin yang didistribusikan kepada 18 Lembaga,

termasuk Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Timur juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Diseminasi informasi tersebut sekaligus dapat membantu lembaga-lembaga dan *stakeholder* terkait kebencanaan termasuk BPBD Provinsi guna pengkajian secara khusus dalam perencanaan Ibu Kota Negara baru yang nantinya berada di wilayah Kalimantan Timur itu sendiri.

3) Komando Daerah Militer VI/ Mulawarman

Komando Daerah Militer VI/Mulawarman atau Kodam VI/Mulawarman merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Kodam VI/ Mulawarman merupakan hasil likuidasi dari Kodam VI/ Tanjungpura, yang pada tanggal 28 Juni 2010 dipecah secara resmi oleh KASAD Jenderal TNI George Toisutta menjadi 2 Kodam yaitu Kodam VI/ Mulawarman dan Kodam XII/ Tanjungpura. Pangdam VI/ Mulawarman saat ini adalah Mayor Jenderal TNI Subiyanto. Saat ini, Kodam VI/ Mulawarman tidak hanya berperan dibidang pertahanan keamanan, akan tetapi menyatu dalam kehidupan sosial masyarakat, saling bahu membahu

menyukseskan pembangunan, bersama-sama saling membantu dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilakukan Kodam VI/Mulawarman dalam penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas TNI yaitu berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Kodam VI/Mulawarman dalam penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur senantiasa didasari regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam program kerja dan Anggaran Kodam VI/ Mulawarman telah diprogramkan bahwa setiap tahun pada triwulan IV, dilaksanakan Latihan Penanggulangan Bencana Alam yang dilaksanakan oleh tiap-tiap Korem. Satuan Kodam VI/Mulawarman juga melatih kemampuan prajurit dalam kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS). Dengan beberapa latihan ini diharapkan dapat menunjang kemampuan prajurit dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam. Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencan pasal 16 bahwa unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi Pra Bencana, Tanggap Darat, ataupun

Passca Bencana. Sesuai dengan pasal 20 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan ppenanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dilaksanakan oleh BPBD.

4) Pangkalan TNI AL Balikpapan

Sesuai Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Alam (PBA) Pangkalan TNI Balikpapan, personil TNI memiliki tugas dan tanggung jawab pada tahap pra, saat, dan pasca bencana. Kegiatan yang dimaksud meliputi

a) Pra bencana melaksanakan kegiatan-kegiatan pembentukan organisasi, mengadakan pelatihan-pelatihan dan penentuan posko, membuka layanan telepon pengaduan serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Contoh implementasi pada fase ini adalah Lanal Balikpapan aktif mensosialisasikan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya wilayah perairan agar terbebas dari genangan sampah plastik yang dapat memicu terjadinya banjir dan yang terbaru adalah sosialisasi tentang Covid-19. Lanal Balikpapan juga melaksanakan penanaman mangrove di Pantai Lamaru Balikpapan guna mendukung

keamanan area Pantai Lamaru dari bencana abrasi. Penanaman mangrove tersebut juga dilakukan pemeliharaan dan pemantauan secara berkala oleh Lanal Balikpapan.

b) Bencana terjadi, melaksanakan kegiatan pencarian dan penyelamatan serta evakuasi korban.
c) Pasca bencana, melaksanakan relokasi, rekonstruksi dan rehabilitasi serta evaluasi, untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pelaksanaannya sesuai rencana dan program yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada praktik di lapangannya, Pangkalan TNI AL Balikpapan berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Daerah, dan Badan Pencarian dan Pertolongan berkolaborasi secara terstruktur dan berkomunikasi dengan baik selama ini, sehingga tidak ada ketumpangtindihan antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini TNI merupakan komponen fasilitas yang secara organisasi tugas berada di dalam koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lanal Balikpapan juga menyampaikan bahwa mereka selalu menjalin hubungan baik dengan stake holder di Kota Balikpapan.

Bahkan sarana dan prasarana lainnya juga didukung oleh beberapa perusahaan BUMN dan swasta untuk menyokong Lanal Balikpapan dalam proses penanggulangan bencana.

5) Dinas Lingkungan Hidup

Pada implementasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, lembaga pemerintah ini lebih menfokuskan terhadap kepedulian lingkungan dengan mengurangi dampak kebarakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan monitoring melalui data SiPongi sebagai mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715 hektar. Untuk mengendalikan bencana kabut asap sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sudah membuat beberapa produk hukum untuk menanganinya.

Dari hasil penelitian, adanya masalah dari aspek sosial berupa rendahnya partisipasi masyarakat untuk kelestarian keanekaragaman hayati, keterbatasan peralatan untuk mengakses penerapan teknologi ramah lingkungan, serta keterbatasan sarana dan prsarana pemantauan kualitas

lingkungan dan laboratorium lingkungan menjadi kendala dalam mengimplementasikan budaya sadar bencana di Kota Balikpapan.

Masalah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan di Indonesia berimbas pada lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terkait isu lingkungan hidup. Belum lagi sinergi antarsektor belum berjalan dengan baik dalam implementasi pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Perbaikan lingkungan hidup disebut masih parsial karena kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektorat.

6) Persatuan Dayak Kalimantan Timur

Partisipasi Masyarakat adat dan kelompok adat dalam menghadapi bencana memiliki peran yang penting. Dalam hal ini Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) sebagai salah satu wadah masyarakat adat Kalimantan Timur bersama-sama dengan pemerintah mengatasi bencana yang ada di Kalimantan dengan menggunakan tiga aspek. yaitu:

a) Aspek pembuatan keputusan dalam terlihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan

gotong royong oleh Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang bersama sama dengan masyarakat bahu membahu mengerjakan bersama-sama sehingga permasalahan kebakaran lahan dapat teratasi dengan maksimal. Selain itu dalam kebiasaan adat dayak mereka sudah memperhitungkan kebutuhan masyarakat dalam membuka lahan sehingga jika dengan perhitungan yang tepat maka kebakaran hutan tidak akan terjadi. Selain itu terjalainnya Forum komunikasi yang baik Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah sehingga dapat terselesaikan segala persoalan dengan musyawarah dan mufakat.

- b) Aspek pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) bersama sama dengan *stakeholder* lainnya memanfaatkan sumber daya lokal mereka bukan untuk di rusak melainkan untuk dilestarikan sehingga mambutuhkan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang bersama sama dengan

Pemerintah Daerah dan *Civil Society* dalam mengatasi kebakaran hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nilai-nilai leluhur yang ditegakkan dengan ritual adat dan semangat gotong royong menjadi modal dasar untuk menyelesaikan permasalahan.

- c) Aspek Pemantauan dan Evaluasi dapat dijelaskan bahwa Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemantauan dan Evaluasi walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan namun hal tersebut tidak dijadikan sebagai penghambat melainkan dapat mengeratkan tali persaudaraan. Seperti kegiatan yang dilakukan Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) dengan aktif mereka mengerakan kesadaran masyarakat untuk tidak membakar hutan. Dan jika ingin membuka lahan hal tersebut sudah melalui perhitungan yang tepat.

- 7) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan

Potensi gelombang tinggi dapat terlihat dari kawasannya yang merupakan kawasan pantai dan muara dari laut. Kemudian potensi abrasi

terlihat dari sisa-sisa tanaman mangrove juga garis pantai yang menjauh ke bibir pantai. Terdapat juga sisa-sisa dari pohon tumbang yang masih terserak di pantai. Pengembangan dan perbaikan terus dilakukan agar Pantai Manggar Segara Sari dapat menjadi salah satu obyek wisata di Kota Balikpapan. Selain itu juga, Dinas Pemuda Olahraga telah memperhatikan mengenai potensi bencana yang dapat terjadi dengan mengajukan pemecah ombak kepada lembaga terkait yang berwenang, dengan mengadakan kerjasama yang melibatkan lembaga dan pihak terkait dan juga mengadakan pelatihan mengenai kebencanaan.

Banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi dan beraktivitas pada kota ini memicu perkembangan kota dengan pesat. Sehubungan dengan pemerintah Balikpapan yang berencana mengembangkan kawasan wisata Pantai Manggar maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat memadai kawasan tersebut demi mendukung kegiatan pariwisata kawasan. Kondisi Pantai Manggar kemudian berimplikasi pada terjadinya bencana ekologis, seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan yang semakin kerap terjadi di berbagai kawasan di Kalimantan Timur. Oleh

karena itu pendekatan rancangan bangunan yang ekologis, yaitu memahami dan selaras dengan perilaku alam di harapkan dapat memberi kontribusi yang berarti bagi perlindungan alam dan sumber daya di dalamnya sehingga mampu membantu mengurangi dampak pemanasan global.

8) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Balikpapan

Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Perolongan Balikpapan mempunyai wilayah kerja $\pm 550.374.80$ Km² terdiri dari 14 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan memerlukan kemampuan mencari (*Search*) lokasi kecelakaan dan kemampuan memberikan pertolongan (*rescue*) terhadap korban kecelakaan. Operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dikatakan berhasil apabila dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan tersebut mampu

menemukan dan menyelamatkan korban seoptimal mungkin.

SIMPULAN

Dari hasil diskusi dan pembahasan di atas, didapatkan kesimpulan bahwa Lembaga Pemerintahan yang ada di Balikpapan, di antaranya ada BPBD Kota Balikpapan, Kodam VI/Mulawarman, BMKG Stasiun III Geofisika, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pencarian dan Pertolongan, Pangkalan TNI AL, Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, maupun Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan memiliki sinergitas yang baik dalam menanggulangi kebencanaan yang ada di Kota Balikpapan dan sekitarnya. Mereka menjalin komunikasi yang baik dan juga melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dengan baik dalam pra, saat, dan pasca bencana.

Lembaga-lembaga di atas mengimplementasikan pembangunan budaya sadar bencana masyarakat Balikpapan dengan cara memfokuskan tindakan pencegahan atau mitigasi bencana dengan saling bekerjasama sesuai bidangnya. Lembaga-lembaga pemerintah tersebut berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kewaspadaan

masyarakat melalui sosialisasi, simulasi, dan pelatihan bencana secara berkala. Sebaiknya sinergitas yang sudah baik ini didukung oleh kontribusi masyarakat yang aktif turut serta di dalam pelatihan evakuasi bencana sejak dari dini agar tertanam baik sistem pembudayaan sadar bencananya. Dengan demikian, apabila bencana terjadi, masyarakat diharapkan tidak lagi panik dan nantinya dengan tenang mereka mengikuti prosedur standar yang telah berkali-kali mereka ikuti. Dari pelatihan, masyarakat bisa belajar soal penataan dan pengelolaan sumber daya serta tanggung jawab dalam penanganan hal-hal terkait aspek keselamatan manusia, baik dalam fase kesiagaan, respon, maupun pemulihan kembali atas kejadian bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S. (2012). Fase Kompresi di Selat Makassar Berdasarkan Data Geologi Daratan, Seismik Laut dan Citra Satelit. *Jurnal Sains dan Teknologi Geologi*, 22(3), p. 137-144.
- Glen. (2017). Terjadi 76 Bencana Banjir dan 21 Tanah Longsor di Balikpapan. Retrieved from <https://www.inibalikpapan.com/2016-terjadi-76-bencana-banjir-dan-21-tanah-longsor-di-balikpapan/>, diakses tanggal 19 Januari 2020.
- IDNNewstime. (2020). Hujan Lima Jam di Balikpapan, Puluhan Rumah Terdampak Banjir. Retrieved from <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/surya-aditya/hujan-lima-jam-di->

- balikpapan-puluhan-rumah-terdampak-banjir/full, diakses tanggal 19 Januari 2020.
- Jia, Z. (2010). Mental Health and Quality of Life Survey Among Child Survivors of the 2008 Sichuan Earthquake. *Quality Life Research*, 19, p.1381- 1391.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mongabay. (2018). Kebakaran di Teluk Balikpapan, Bencana Lingkungan yang Harus Diusut Penyebabnya. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2018/04/02/kebakaran-di-teluk-balikpapan-bencana-lingkungan-yang-harus-diusut-penyebabnya/>, diakses tanggal 28 Februari 2020.
- Pramono, R. (2016). Perspektif Sosiologis dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(1), p. 81-95.
- Priambodo, A., Widyaningrum, N., & Rahmat, H. K. (2020). Strategi Komando Resor Militer 043/ Garuda Hitam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. *PERSPEKTIF*, 9(2), 307-313.
- Prihatin, R. B. (2018). Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), p. 1-20.
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.
- Rahmat, H. K., Kasmi, & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur'ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 2, 455-461.
- Rahmat, H. K., Nurmalasari, E., & Basri, A. S. H. (2018). Implementasi Konseling Krisis Terintegrasi Sufi Healing Untuk Menangani Trauma Anak Usia Dini pada Situasi Krisis Pasca Bencana. *Prosiding Seminar Nasional PIT ke- 5 Riset Kebencanaan IABI 2018*, 671-678.